

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK DAN PEMETAAN TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH GAMPONG PANGGONG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN

Cut Suciatina Silvia¹

¹ Prodi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Teuku Umar Meulaboh
coetsilvia@gmail.com

Abstract

Identification characteristics of the slums area need can be done for each region. the purpose of this identification to know exactly the problems that existed in the village of Panggong. Identification of problems with the review of indicators and parameters of untidiness. And then will be resulting strategy handling for location or region that have a problems of slum. The identification in this research is performed only on the physical aspects, and observation is done directly in the field. Analysis Methods the level of untidiness and determination of the slums area is done with comprehensive analysis method. The level of untidiness and deliniasi regions of slum obtained, further analysis is done with a matrix of issues and handling that will be done. The results identification of the characteristics of the slums area indicates that the problem most dominant are present on the parameters irregularity of the building 75%, the road is not worthy of 61%, and waste water problems fused with the drainage environmental of 100%. The Results from study of the problems further is done of calculation to obtain the level of untidiness Gampong Panggong obtained 59% or the level of untidiness is medium. Handling for the problem of slums area is done with zoning as a step in determine the zone of priority handling, where is a zone of priority handling problems of slums area in zone 1.

Keywords: *characteristics of the slums area, identification of the slums area, The level of untidiness, handling the slums area*

1. PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembangnya kota. Kebutuhan akan lahan dan tingkat kepadatan pun akan semakin tinggi seperti Gampong Panggong yang merupakan suatu wilayah yang berada di pusat Kota Meulaboh yang juga tidak luput dari permasalahan tersebut. Undang-undang No 1 tahun 2011 terkait perumahan dan kawasan permukiman menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi serta kualitas sarana dan prasarananya tidak memenuhi yang diisyaratkan. Dengan kata lain Permukiman kumuh merupakan suatu kondisi dimana kawasan permukimannya mengalami penurunan peningkatan kualitas.

Kondisi ini dapat di bedakan menjadi beberapa aspek yaitu aspek fisik dan aspek non fisik. Aspek fisik meliputi kondisi bangunan hunian yang tidak layak, tata letak bangunan tidak teratur, tidak memiliki sempadan bangun jalan, kondisi antar rumah tidak memiliki *space* yang layak/berdempetan, jalan dan sistem drainase yang buruk, sarana dan prasarana infrastruktur yang ada tidak memadai atau bahkan tidak ada. yang tata letak bangunannya tidak teratur, halamannya yang sempit dan bahkan langsung berbatasan dengan jalan, bangunan yang berdempet serta sarana

dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan aspek sosial meliputi kondisi masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah rerata atau MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, legalitas pendirian bangunan seperti bangunan hunian tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan lahan untuk bangunan hunian tidak memiliki surat-surat yang diakui oleh pemerintah. kesehatan yang kurang memadai, Berdasarkan aspek sosial, permukiman kumuh ditandai dengan pertambahan penduduk yang tinggi, tingkat pendapatan dan kesehatan yang rendah.

Kedua kondisi dari aspek tersebut menjadi masalah yang sangat berdampak terhadap perkembangan kota, yang terlihat dari fisik kota yang mengalami penurunan akibat rendahnya pemeliharaan terhadap kualitas dari sarana dan prasarana infrastruktur yang ada, rendahnya standar kesehatan yang mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat pun menjadi rendah. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka perlu dilakukan identifikasi menyangkut dengan permasalahan kumuh di wilayah studi Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Identifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi nyata berdasar dari indikator-indikator kekumuhan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Kondisi nyata yang didapatkan akan dianalisis untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekumuhan yang ada di kawasan permukiman Gampong Panggong. Dengan metode *overlay*, selanjutnya akan dapat ditentukan lokasi/kawasan mana deliniasi kumuh yang paling dominan, sehingga perlu segera dilakukan analisis untuk dapat menentukan skenario penanganan yang tepat dengan konsep penanganan yang sesuai dengan kondisi wilayah studi. agar dapat tercapai suatu lingkungan permukiman yang sehat, layak huni serta berkualitas bagi masyarakat dan tidak memunculkan kawasan kumuh yang baru.

2. KAJIAN LITERATUR

Definisi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Undang-undang No 1 tahun 2011 terkait perumahan dan kawasan permukiman menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi serta kualitas sarana dan prasarananya tidak memenuhi yang diisyaratkan.

Permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang berpenghuni padat atau melebihi 500 jiwa per hektare dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundang-undangan yang berlaku (Khomarudin, 1997).

Kawasan pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).

Karakteristik atau ciri-ciri permukiman kumuh adalah sebagai berikut: 1) Dihuni oleh penduduk dengan penghasilan rendah dengan porsi pengeluaran untuk makan dan minum yang relative besar; 2) Pendidikan kepala keluarga pada umumnya rendah; 3) Pemakaian air bersih juga masih relative sedikit; 4) Pembuangan sampah tidak tertata rapi, dan cenderung ada kesan berserakan; 5) Cara penduduk pembuangan membuang tinja dan kotoran lain tidak sehat; 6) Drainase kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi genangan air, berbau busuk dan kotor; 7) Bangunan berhimpitan dan seadanya karena pada umumnya tidak berstatus penempatan atau pemilihan lahan yang jelas (Adi Prasetyo, 2009).

Faktor-faktor Penyebab terjadinya Permukiman Kumuh

Penyebab tumbuhnya lingkungan kumuh adalah urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sulit mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah serta semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah (Khomarudin,1997).

Tidak tersedianya fasilitas perumahan yang terjangkau oleh kantong masyarakat yang kurang mampu serta kebutuhan akan akses ke tempat usaha menjadi penyebab timbulnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan.(Suparto, 2014).

Indikator, Kriteria dan Parameter Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh

Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, maka indikator permukiman kumuh terbagi atas 7 indikator yaitu kondisi bangunan hunian, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan kondisi pengamanan kebakaran. Indikator, kriteria dan parameter tingkat kekumuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Indikator, Kriteria dan Parameter Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh

| No | Indikator kekumuhan | Kriteria kekumuhan | Parameter | Skor |
|----|------------------------------|---|--|------|
| 1 | Kondisi bangunan hunian | a. Ketidakteraturan bangunan | 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 5 |
| | | | 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 3 |
| | | | 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 1 |
| | | b. Tingkat kepadatan bangunan | 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 5 |
| | | | 51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 3 |
| | | | 25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 1 |
| | | c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 |
| | | | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 |
| | | | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 |
| No | Indikator kekumuhan | Kriteria kekumuhan | Parameter | Skor |
| 2 | kondisi jalan lingkungan | a cakupan pelayanan jalan lingkungan | 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan | 5 |
| | | | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 3 |
| | | | 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 1 |
| | | b. Kualitas permukaan jalan lingkungan | 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 5 |
| | | | 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 3 |
| | | | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 1 |
| 3 | kondisi penyediaan air minum | a. Ketersedian akses aman air minum (kualitas) | 76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 5 |
| | | | 51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 3 |
| | | | 25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 1 |
| | | b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum (kuantitas) | 76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 5 |
| | | | 51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 3 |
| | | | 25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 1 |
| | | dst... | | |

Berdasarkan kriteria dan parameter tersebut di atas, maka tingkat kekumuhan dapat dibedakan atas:

| | |
|--------------|--------|
| Kumuh berat | 71-95% |
| Kumuh sedang | 45-70% |
| Kumuh ringan | 19-44% |
| Tidak Kumuh | < 19% |

Sampling Lokasi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *cluster random sampling*. Metode *cluster sampling* ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila memiliki data yang sangat luas, dan pengambilan sampelnya juga didasarkan pada daerah populasi yang telah ditetapkan secara acak. Berdasarkan jumlah penduduk di wilayah studi yaitu Gampong panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 yaitu sebanyak 329 Kepala Rumah Tangga. Untuk menentukan ukuran sampel data rumah tangga pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin di bawah ini (Idris, 2012) :

$$n = \frac{N}{1 + Nxe^2}$$

dimana:

n = Jumlah sampel;

N = Ukuran populasi;

e = Nilai kritis/batas ketelitian (biasa digunakan 10%)

3. METODE PENELITIAN

Lokasi, waktu dan jenis penelitian

Lokasi penelitian ini dibatasi dan dilakukan hanya pada wilayah kawasan permukiman Gampong panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas wilayah 10,49 ha. Secara administratif Gampong Panggong terdiri dari 4 dusun yaitu dusun selada, dusun bayam, dusun kangkung dan dusun tomat. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan April-Juli 2016 dan jenis penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil *sampling* dengan metode Slovin, sampel data rumah tangga yang akan digunakan pada penelitian ini sebesar 77 rumah tangga.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi sumber data dan jenis data yang digunakan. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari Gampong Panggong berupa data kondisi demografi, peta gampong dan peta eksisting kondisi sarana dan prasarana infrastruktur gampong.

1. Data primer ini didapat melalui pendataan 100-0-100 yang meliputi 7 indikator kekumuhan di 4 (empat) dusun yang ada di Gampong Panggong. Data 7 indikator kumuh meliputi data: Kondisi bangunan hunian, berupa kondisi keteraturan bangunan hunian, kondisi kepadatan bangunan hunian berdasarkan data jumlah total bangunan hunian dengan luas permukiman per dusun, kelayakan bangunan hunian berdasarkan bangunan hunian yang memiliki luas lantai 7,2m²/ Jiwa dan kondisi ALADIN yang sesuai persyaratan teknis.
2. Kondisi aksesibilitas jalan lingkungan, berupa jalan lingkungan yang layak berdasarkan panjang total jalan lingkungan dan panjang jalan lingkungan dengan kondisi diperkeras dan lebar >1,5 m. Selain itu dilakukan pendataan terhadap jalan yang tidak sesuai persyaratan

- teknis berdasarkan data panjang jalan lingkungan yang memiliki lebar > 1,5 meter diperkeras dan tidak rusak serta jalan lingkungan yang memiliki bangunan pelengkap di samping jalan.
3. Kondisi drainase lingkungan, pendataan yang dilakukan berupa luas area yang memiliki genangan di dalam permukiman dan kondisi drainase yang berfungsi baik dari total panjang drainase.
 4. Kondisi penyediaan air minum, pendataan yang dilakukan berupa ketersediaan akses penyediaan air minum dan keterpenuhan kebutuhan air baku.
 5. Kondisi pengelolaan air limbah, pendataan yang dilakukan berupa ketersediaan akses air limbah, sanitasi yang tidak sesuai persyaratan teknis berdasarkan keterpenuhan kebutuhan air baku dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan drainase lingkungan.
 6. Kondisi pengelolaan sampah, pendataan yang dilakukan berupa sampah domestik dari rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPS minimal dua kali dalam seminggu.
 7. Kondisi resiko bencana dan pengamanan kebakaran, pendataan yang dilakukan berupa rumah tangga yang memiliki sarana dan prasarana pengamanan kebakaran serta kondisi resiko bencana yang paling besar terjadi di Gampong Panggong.

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Gampong Panggong berupa data kondisi demografi seperti data jumlah penduduk di setiap dusun, luasan gampong dan luasan permukiman setiap dusun, serta kondisi eksisting sarana prasarana infrastruktur yang ada di Gampong panggong. Data-data primer dan sekunder tersebut dibutuhkan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kekumuhan yang ada di kawasan permukiman Gampong panggong.

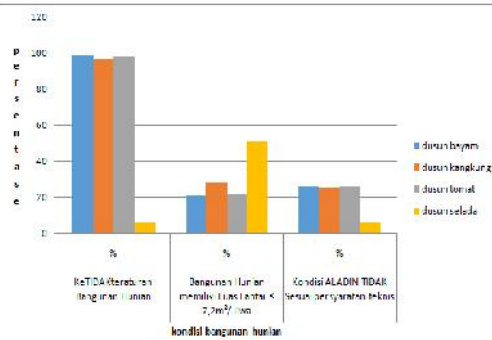
Tabel 3 Data Jumlah Kepala Rumah Tangga dan Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan

| Dusun | Jumlah Kepala Rumah Tangga | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jumlah Penduduk Perempuan |
|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dusun Bayam | 76 | 79 | 53 | 23 | 169 | 148 |
| Dusun Kangkung | 65 | 74 | 17 | 48 | 162 | 141 |
| Dusun Tomat | 121 | 123 | 61 | 60 | 268 | 228 |
| Dusun Selada | 67 | 67 | 52 | 15 | 170 | 184 |
| Total | 329 | 343 | 183 | 146 | 769 | 701 |

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Karakteristik Perumahan dan Permukiman Kumuh Gampong Panggong Analisis Kondisi Bangunan Hunian

Untuk melihat kondisi bangunan hunian pada lokasi studi ini dilakukan pada 4 dusun yang ada di Gampong Panggong. Berdasarkan hasil analisis kondisi bangunan hunian didapatkan kondisi bangunan hunian yang memiliki ketidakaturan bangunan paling dominan berada di dusun Bayam, Kangkung dan dusun Tomat yang memiliki rerata kondisi ketidakaturan bangunan hunian sebesar 98%. Tingkat kepadatan bangunan hunian rerata sebesar 48 unit/ha, dimana tingkat kepadatan bangunan hunian masih rendah dibawah 250 unit/ha. Untuk kelayakan bangunan yang dilihat berdasarkan kondisi bangunan hunian yang memiliki luas lantai 7,2m²/jiwa dan kondisi Aladin yang tidak sesuai persyaratan teknis paling besar berada di dusun Selada sebesar 51% dan 60%.



Grafik 1 Grafik persentase kondisi bangunan hunian per dusun



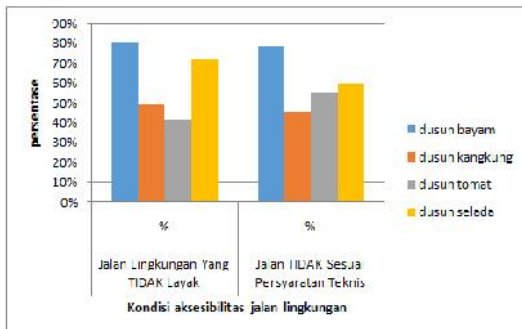
Gambar 1 Kondisi fisik dan jarak antar bangunan

Dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi bangunan hunian yang paling banyak memiliki permasalahan terdapat pada ketidakaturan bangunan hunian sebesar 79,33%, sedangkan untuk bangunan hunian yang memiliki luas lantai $7,2m^2/jiwa$ dan kondisi bangunan hunian yang aladin dan tidak sesuai persyaratan teknis sebesar 30% dan 34%. Secara realita di lapangan, kondisi bangunan hunian Gampong Panggong masih sangat layak dikarenakan bangunan hunian yang dibangun oleh NGO setelah Tsunami dalam kondisi permanen, namun kerapatan antar bangunan hunian yang terlihat masih ada yang memiliki jarak di bawah 1 meter.

Analisis Kondisi Jalan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis kondisi jalan lingkungan didapatkan kondisi jalan lingkungan yang tidak layak ada di dusun Bayam dan dusun Selada dengan persentase ketidak layakan jalan lingkungan sebesar 81% dan 72% atau rerata sebesar 77%. Jalan lingkungan yang tidak layak ini diperoleh dari jalan lingkungan dengan lebar $> 1,5$ meter dan diperkeras berbanding dengan total panjang jalan yang ada. Masih terlihat di dusun Tomat yang memiliki lebar jalan di bawah 1,5 meter. Kondisi jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis juga berada di dusun Bayam, dusun Selada dan dusun Tomat dengan rerata 65%, sedangkan untuk dusun Kangkung masih berada di bawah 50%. Sesuai dengan persyaratan teknis jalan, bahwasanya jalan lingkungan yang dikatakan baik adalah jalan lingkungan dimana memiliki lebar jalan $> 1,5$ meter dan memiliki bangunan pelengkap/saluran disamping jalan.

Dapat disimpulkan bahwa jangkauan jaringan jalan lingkungan di Gampong Panggong untuk jalan lingkungan yang tidak layak sebesar 61% atau sepanjang 1715 meter yang masih memiliki permasalahan. Sedangkan untuk permasalahan jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis sebesar 60% atau sekitar 1676 meter. Dari segi aksesibilitas, secara umum kondisi jalan lingkungan yang ada di lingkungan permukiman Gampong Panggong cukup baik dan sudah diperkeras, hanya saja masih ada yang belum dilengkapi dengan bangunan pelengkap.



Grafik 2 Grafik persentase kondisi jalan lingkungan per dusun

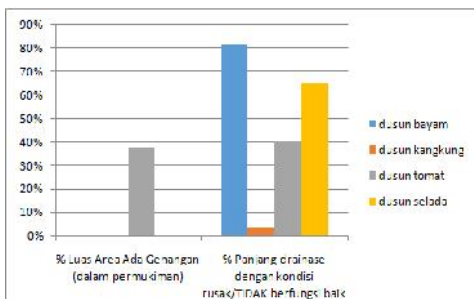


Gambar 2 Kondisi aksesibilitas jalan

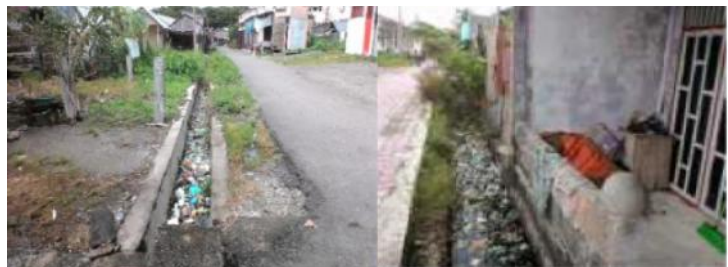
Analisis Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis kondisi drainase lingkungan didapatkan kondisi untuk luas area yang ada genangan di dalam permukiman hampir tidak ada, hanya di dusun tomat dengan luas area genangan sebesar 0,12 hektare atau sekitar 37,5%. Sedangkan untuk panjang drainase yang rusak dan tidak berfungsi baik sebesar 81% ada di dusun Bayam dan 65% di dusun Selada. Banyak drainase yang sudah dibangun memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga permasalahan drainase disetiap dusunnya sama begitu pula dengan pemeliharaan yang tidak berjalan baik dimana masih terlihat sampah bertumpuk di dalam drainase, sehingga menghambat aliran air dan menyebabkan genangan baik di dalam drainase maupun di badan jalan saat debit hujan yang tinggi serta berdampak buruk terhadap kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi drainase lingkungan di Gampong Panggong, untuk drainase lingkungan yang rusak dan tidak berfungsi baik sebesar 48% atau sepanjang 2029 meter yang masih memiliki permasalahan. Sedangkan untuk genangan dalam permukiman cukup kecil sebesar 9%.



Grafik 3 Grafik persentase kondisi drainase lingkungan

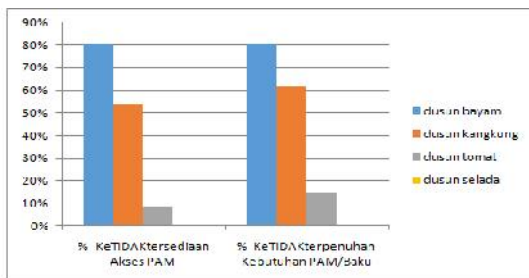


Gambar 3 Kondisi drainase lingkungan

Analisis Kondisi Penyediaan Air Minum

Berdasarkan hasil analisis kondisi penyediaan air minum sebesar 80% masih bermasalah terhadap ketidaktersediaan akses penyediaan air minum, sedangkan untuk dusun Selada sudah terpenuhi akses PAM 100%. Kondisi ketidakterpenuhan kebutuhan air minum/baku sebesar 80% dan 62% atau rerata sebesar 71% berada di dusun Bayam dan dusun Kangkung. Kenyataan di lapangan, akses jaringan dan pelayanan air minum masih belum tercapai secara optimal, seperti yang terjadi di dusun Kangkung. Secara dominan masyarakat Gampong Panggong masih menggunakan air yang berasal dari sumur galian dan sumur bor, dimana hampir 90% memiliki sumur pribadi. Sistem sanitasi dan pengolahan air limbah yang kurang terkontrol juga mempengaruhi kualitas air bersih. Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat juga

membeli air secara eceran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci. Dapat disimpulkan bahwa kondisi penyediaan air minum di Gampong Panggong, berdasarkan ketidaktersediaan akses PAM dan keterpenuhan kebutuhan air minum berada di bawah 40% atau rerata sebesar 37%. Secara umum mungkin tidak mengalami permasalahan karena masih berada di bawah 40%, namun tetap menjadi masalah dikarenakan masyarakat Gampong Panggong harus mengeluarkan uang atau pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.



Grafik 4 Grafik persentase kondisi penyediaan air minum

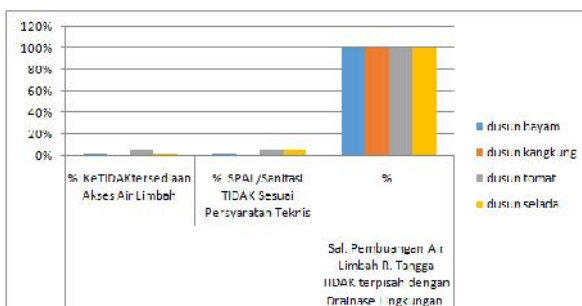


Gambar 4 Kondisi sumber air bersih

Analisis Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan hasil analisis kondisi pengelolaan air limbah terlihat bahwa hampir semua dusun sudah memiliki ketersediaan air limbah, seperti di dusun kangkung sudah terpenuhi akses 100%. Namun akses SPAL yang ada belum sesuai dengan persyaratan teknis, dimana terlihat di dusun Tomat sebanyak 72% belum atau bahkan tidak memiliki SPAL/sanitasi yang sesuai dengan standar teknis. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih ada rumah tangga yang tidak memiliki atau menggunakan kloset leher angsa.

Dari analisis di dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi pengelolaan air limbah di Gampong Panggong, hampir semua rumah tangga sudah memiliki ketersediaan akses air limbah yaitu sebesar 98%. Sedangkan sebesar 45% masih belum memiliki SPAL/sanitasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dan kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa saluran pembuangan air limbah dari rumah tangga bercampur/tidak terpisah dengan drainase lingkungan. Kondisi ini akan sangat mengganggu kesehatan lingkungan, mengganggu air tanah atau bahkan membuat air sumur berbau dikarenakan jarak dengan sumur gali berada di bawah 10 meter.



Grafik 5 Grafik persentase kondisi pengelolaan air limbah



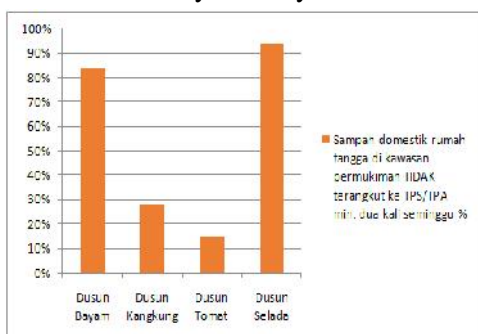
Gambar 5 Kondisi air limbah

Analisis Kondisi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil analisis kondisi pengelolaan sampah, terlihat bahwa di dusun Bayam dan dusun Selada merupakan lokasi dimana sampah domestik dari rumah tangga tidak terangkut ke

TPS (tempat pembuangan sementara) atau TPA (tempat pembuangan akhir) sebesar 84% dan 94%. Dari tabel analisis di bawah ini dapat disimpulkan bahwa sampah buangan dari domestik rumah tangga sebesar 55% tidak terangkut. Kondisi nyata di lapangan terlihat dominan masyarakat di gampong panggong membakar sampah domestik di halaman depan dan belakang rumah, dikarenakan tidak ada bak sampah dilokasi permukiman.

Hampir disejumlah lingkungan belum tersedia TPS, namun beberapa rumah tangga menempatkan tong sampah pribadi di setiap rumahnya, kemudian sampah tersebut dibuang sendiri ke bak sampah yang berada di dekat taman kota dan bahkan ada juga yang membuangnya pada lahan kosong di sekitar permukiman. Kondisi ini sangat dikhawatirkan karena sampah yang dibuang dan bertumpuk di depan/dilahan permukiman akan menyebabkan bau, dan mengganggu kesehatan masyarakatnya.



Grafik 6 Grafik persentase kondisi pengelolaan sampah per dusun



Gambar 6 Kondisi persampahan

Analisis Kondisi Resiko Bencana

Potensi bencana yang biasa terjadi di Gampong Panggong adalah bencana banjir yaitu berupa banjir rob/pasang surut, mengingat kawasan permukiman gampong panggong berada tidak jauh dari laut. Selain itu, potensi kebakaran akan rentan terjadi dikarenakan kondisi bangunan yang sangat berdekatan dan sarana prasarana terhadap pengamanan kebakaran tidak ada. Berdasarkan hasil analisis kondisi pengamanan kebakaran terlihat bahwa disemua dusun yang ada di Gampong Panggong tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Kondisi nyata di lapangan dengan jarak antara bangunan sangat rapat, harusnya disetiap lorong dan dusun memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran/hidran kebakaran dengan jarak per 200 meter, dan untuk sumber air pada hidran sangat mudah didapatkan, dimana jarak sumber air laut dengan permukiman cukup dekat.

Analisis Tingkat Kekumuhan dari Permukiman Gampong Panggong

Dari hasil analisis semua data fisik yang didapatkan di lapangan, tingkat kekumuhan pada permukiman Gampong panggong Kecamatan Johan Pahlawan sebesar 59% atau tergolong kepada permukiman kumuh sedang yang berada pada tingkat kekumuhan 45-70%. Berdasarkan kajian-kajian tersebut, maka ditetapkanlah zonasi kekumuhan melalui delianiasi kumuh Gampong Panggong, dimana terdapat pada 2 zonasi permasalahan. Penentuan lokasi prioritas tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Analisa SWOT dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Zonasi 1 dianggap zona yang paling banyak memiliki permasalahan dan diharapkan dapat dilakukan penanganan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sedang pada zona 2 dianggap zona yang paling sedikit mengalami permasalahan, sehingga pada zona ini diharapkan adanya penanganan melalui pola penganan pencegahan, ini dilakukan agar tidak akan memunculkan kawasan kumuh yang baru. Dari data analisis dan observasi pendataan Panggong, dari kriteria kekumuhan yang telah ditinjau maka ditetapkan Zona 1 sebagai zona prioritas penanganan, dimana

dusun yang masuk ke dalam zona 1 adalah Dusun Bayam, dusun Kangkung, dusun Selada, dan dusun Tomat.



Gambar 7 Penentuan zonasi yang dihasilkan dari analisis masalah permukiman kumuh

Matriks Analisis masalah dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

Dari identifikasi dan analisis permasalahan permukiman kumuh di Gampong Panggong, maka dapat dilakukan strategi penanganannya seperti terlihat pada analisis matriks di bawah ini.

| MASALAH | STRATEGI | MASALAH | STRATEGI |
|--|--|--|---|
| Masih ada hunian warga di zona 1 yang tidak layak huni /Bangunan Hunian tidak sesuai standar teknis | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan pengguna anggaran agar melakukan prioritas perbaikan terhadap hunian serta menjaga permukiman dari tindakan yang menyebabkan kumuh - Melakukan rehab terhadap rumah warga yang sudah tidak layak huni | Umumnya warga membakar sampah dipekarangan dan lahan kosong dan sebagian membuang ke parit dan lahan terbuka. (Pembuangan tidak pada tempatnya, tidak adanya tempat pembuangan sampah) | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan pengguna anggaran agar melakukan prioritas dalam perencanaan, dan perencanaan dilakukan secara partisipatif - Melakukan pembangunan TPS di setiap kepadatan penduduk - Menyediakan tong sampah di setiap hunian warga |
| Masih adanya jalan lingkungan dengan kondisi permukaan tanah dengan total panjang | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan pengguna anggaran agar melakukan prioritas dalam perencanaan, dan perencanaan dilakukan secara partisipatif - Melakukan pemeliharaan terhadap jalan yang telah dibangun - Membangun swadaya masyarakat dalam melakukan perbaikan maupun pembangunan jalan - Melakukan pembangunan jalan baru bagi lokasi yang belum ada jalan | Masih ada warga yang tidak memiliki WC dan WC sudah tidak layak pakai di rumahnya, sebagian warga masih menggunakan lahan kosong untuk Bab/Pembangunan Mck tidak sesuai standar teknis | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan pengguna anggaran agar melakukan prioritas dalam perencanaan, dan perencanaan dilakukan secara partisipatif - Melakukan pembangunan jamban sesuai teknis bagi warga kurang mampu |
| Terdapatnya kondisi Jalan lingkungan yang rusak | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan pengguna anggaran agar melakukan prioritas dalam perencanaan, dan perencanaan dilakukan secara partisipatif - Melakukan pemeliharaan terhadap jalan yang telah dibangun - Membangun swadaya masyarakat dalam melakukan perbaikan maupun pembangunan jalan - Melakukan perbaikan terhadap jalan yang sudah rusak | Umumnya sanitasi limbah rumah tangga tercampur dengan saluran lingkungan dan dibiarkan tergenang disekitar MCK. (Sanitasi tidak sesuai standar teknis) | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan pengguna anggaran agar melakukan prioritas dalam perencanaan, dan perencanaan dilakukan secara partisipatif - Memberikan pemahaman kepada warga terhadap dampak daripada pencemaran limbah rumah tangga - Membangun sistim pengelolaan limbah rumah tangga yang benar sesuai persyaratan teknis |
| Mayoritas warga masih menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih, sedangkan kondisi keruh dan berbau | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan pengguna anggaran agar melakukan prioritas dalam perencanaan, dan perencanaan dilakukan secara partisipatif - Melakukan pemasangan jaringan PDAM ataupun sumur bor sebagai sumber kebutuhan air bersih warga | Belum tersedianya pengamanan kebakaran (hydrant) diwilayah padat penduduk | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan aparaturnya terhadap pentingnya pengamanan bahaya kebakaran - Melakukan penyediaan pengamanan bahaya kebakaran |
| | | Belum adanya ruang terbuka publik sebagai sarana interaksi sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada warga dan aparaturnya terhadap fasilitas interaksi sosial - Melakukan pembangunan fasilitas ruang terbuka publik sebagai sarana interaksi sosial |

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil identifikasi karakteristik permukiman kumuh menunjukkan bahwa:
 - a. Kondisi bangunan hunian masih sangat layak dikarenakan bangunan hunian yang dibangun oleh NGO setelah Tsunami dalam kondisi permanen, namun kerapatan antar bangunan hunian yang terlihat masih ada yang memiliki jarak di bawah 1 meter. Hasil analisis menunjukkan ketidakteraturan bangunan sebesar 79,03% dan kondisi bangunan hunian yang tidak sesuai persyaratan teknis sebesar 30-34%.
 - b. Kondisi jaringan jalan, dari segi aksesibilitas secara umum dalam kondisi cukup baik dan sudah diperkeras, hanya saja masih ada yang belum dilengkapi dengan bangunan pelengkap. Hasil analisis menunjukkan permasalahan jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis sebesar 60% atau sekitar 1676 meter.
 - c. Kondisi drainase lingkungan yang sudah dibangun masih memiliki kualitas yang kurang baik, dimana masih terlihat sampah bertumpuk di dalam drainase, sehingga menghambat aliran air dan menyebabkan genangan baik di dalam drainase maupun di badan jalan saat debit hujan yang tinggi. Hasil analisis menunjukkan kondisi drainase lingkungan yang rusak dan tidak berfungsi baik sebesar 48% atau sepanjang 2029 meter.
 - d. Kondisi penyediaan air minum berdasarkan ketidakterediaan akses PAM dan keterpenuhan kebutuhan air minum berada di bawah 40% atau rerata sebesar 37%. Secara umum mungkin tidak mengalami permasalahan karena masih berada di bawah 40%, namun tetap menjadi masalah dikarenakan masyarakat Gampong Panggong harus mengeluarkan uang atau pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.
 - e. Kondisi pengolahan air limbah masih belum memiliki SPAL/sanitasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebesar 45%, dan kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa saluran pembuangan air limbah dari rumah tangga bercampur/tidak terpisah dengan drainase lingkungan. Kondisi ini akan sangat mengganggu kesehatan lingkungan, mengganggu air tanah atau bahkan membuat air sumur berbau dikarenakan jarak dengan sumur gali berada di bawah 10 meter.
 - f. Kondisi pengelolaan sampah Hampir disejumlah lingkungan belum tersedia TPS, namun beberapa rumah tangga menempatkan tong sampah pribadi di setiap rumahnya, kemudian sampah tersebut dibuang sendiri ke bak sampah yang berada di dekat taman kota dan bahkan ada juga yang membuangnya pada lahan kosong di sekitar permukiman. Kondisi ini sangat dikhawatirkan karena sampah yang dibuang dan bertumpuk di depan/dilahan permukiman akan menyebabkan bau, dan mengganggu kesehatan.
 - g. Kondisi resiko bencana yang biasa terjadi di Gampong Panggong adalah bencana banjir yaitu berupa banjir rob/pasang surut, mengingat kawasan permukiman gampong panggong berada tidak jauh dari laut. Potensi kebakaran akan rentan terjadi dikarenakan kondisi bangunan yang sangat berdekatan dan sarana prasarana terhadap pengamanan kebakaran tidak ada hampir disemua dusun.
2. Hasil analisis tingkat kekumuhan dari permukiman di Gampong panggong sebesar 59% dan tergolong kepada permukiman kumuh sedang yang berada pada tingkat kekumuhan 45-70%.
3. Dari hasil analisis tingkat kekumuhan dan permasalahan yang ada, maka untuk deliniasi kumuh dibagi ke dalam 2 zona, dimana zona 1 sebagai zona prioritas penanganan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dan zona 2 menjadi zona penanganan dalam pencegahan permukiman kumuh agar tidak menimbulkan kumuh baru.

Saran

1. Pemerintahan Gampong Panggong bersama pemerintahan daerah melakukan identifikasi dan skenario penanganan dalam perencanaan pembangunan pada wilayah permukiman yang sudah terdeliniasi sebagai zona prioritas penanganan kumuh.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan kajian terhadap rencana teknis dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh yang masuk ke dalam zona prioritas penanganan kumuh baik dari segi kondisi fisik maupun non fisik.
3. Pemeritah Gampong bersama masyarakat dapat melakukan kajian terhadap rencana investasi program dan nantinya dapat melakukan *channeling* dengan pihak luar dan SKPD terkait kebutuhan pembangunan dalam menangani permasalahan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Adi Prasetyo, 2009, '*Karakteristik Permukiman Di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surabaya*', Fakultas Geografi, Surakarta.
- [2]Budiharjo, 1997, "*Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*" Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- [3]Idris, 2012, '*Analisa Kinerja Jaringan Distribusi Air Bersih Di Perumnas Lingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*', Magister Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- [4]Khomarudin, 1997, '*Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta: Yayasan REI – PT. Rakasindo.
- [5]Permen PUPR, 2016, Tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh.
- [6]Suparto, 2014 , "*Evaluasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Berbasis Lingkungan Di Kelurahan Kalibanteng Kidul Kota Semarang*", Volume XXI, Nomor 1 Maret 2014, Semarang.
- [7] Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman.